

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku:

- Arliman S, Laurensius. 2015a. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Arliman S, Laurensius. 2015b. *Komnas HAM Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press
- Efendi, Jonaedi, dkk. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenamedia Group
- Eleanora, Fransiska Novita, dkk. 2021. *Buku Ajar Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Malang: Madza Media
- Elsya, Rosmery. 2019. *Modul Mata Kuliah Legislasi*. Jatinagor: Fakultas Hukum Tata Pemerintah Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- Edi, Setiadi. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Kencana
- Hamzah, Andi. 2011. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Ishaq. 2016. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Krisna, Liza Agnesta. 2018. *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Lamintang, P.A.F., Franciscus Thoejunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Martono, Nanang. 2016. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mertha, Ketut, dkk. 2016. *Bukum Ajar Hukum Pidana*. Universitas Udayana
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Soetodjo, Wagiyati. 2012. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sofyan, Andi & Nur Azisah. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makasar: Pustaka Pena Press.

- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suhasril. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: PT Rajagrafindo Persada Depok.
- Suyanto. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Taman Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Syamsudin, M. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Marzuki, Peter Mahmud. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada
- Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Yahya Harahap M, 2010, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Artikel dalam Jurnal**
- Anisah, Laili, N. (2022). “Perbandingan Hukum Kedudukan Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Dan Pembunuhan Bayi di KUHP Dan RKUHP”. *Jurnal Paradigma Hukum* Volume 7 Nomor. 1. (hlm 66).
- Ariyanti, Vivi. (2019). “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. *Jurnal Yuridis* Volume 6 Nomor 2. (hlm 43)
- Baehaqi, Eki, S. (2022). “Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana”. *Jurnal Studi Keislaman* Volume 1 Nomor 1. (hlm 4).
- Djufri, Darmadi. (2022). “Proses Pemeriksaan Perkara Di Muka Persidangan Pada Dakwaan Tindak Pidana Dan Benda Sitaan Dalam Proses Peradilan”. *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* Volume 20 Nomor, 1. (hlm 53).

- Hidayat, Eko. (2016). "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Volume 8 Nomor 2. (hlm 80)
- Iswara, Made Agus Mahendra & Sukma, Putu Angga Pratama. (2021). "Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penanggulangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Subyek Hukum Notaris Dan PPAT". *Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar* Volume. 1 No. 1. (hlm 44).
- Ismansyah. (2010). "Permasalahan Hukum Dalam Pengembangan Ilmu Hukum Di Indonesia (Pentingnya Reformasi Hukum Terkait Dengan Permasalahan Hukum)". *Jurnal Demokrasi* Volume 9, Nomor 21. (hlm 11).
- Justitia, Airlangga. (2018). "Pembuangan Bayi Dalam Perspektif Penelitian Anak". *UBELAJ*, Volume 3 Nomor 1. (hlm 24).
- Mayang, Rizqi. (2019). "Tindak Pidana Pembuangan Anak yang Baru Dilahirkan Serta Pertanggungjawaban Pihak Terkait". *Jurist-Diction*: Volume 2 Nomor 2, Maret 2019. (hlm 690).
- Mekel, Fransisco. dkk. (2020). "Pengambilan Putusan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan KUHP". *Lex Administratum*, Volume. 8 No. 4. (hlm 125).
- Moho, Hasaziduhu. (2019). "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan". *Jurnal Warta Edisi*: 59. (hlm 15).
- Nurhasidah. (2019). "Penegakan Hukum Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Reteh Indragiri Hilir Riau". *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* Volume VI: 1. (hlm 7).
- Pause, Firdaus. (2017). "Kewenangan Polisi Selaku Penyidik Dalam Melaksanakan Upaya Paksa Penggeledahan Dalam Pasal 33-37 KUHP". *Lex et Societatis*. Volume V Nomor 5. ( hlm 169).
- Pranata, Kadek Indra Adi, dkk. (2022). "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi Di Wilayah hukum Kabupaten

- Buleleng”. *E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum Volume 5 Nomor 1.* (hlm 161)
- Sardari, Ahmad, A. dkk. (2022). “Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum”. *Journal of Islamic Law/JIFLAW Volume 1 No. 1.* (hlm 15).
- Sastrawan, I, M, I. dkk. (2022). “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembuangan Bayi Di Wilayah Hukum Polres Bangli”. *Jurnal Analogi Hukum Volume 4, Nomor 3.* (hlm 317).
- Simbolon, Alum. (2017). “Profesionalitas Dan Integritas Hakim Dalam Penegakan Hukum”. *Prosiding Fakultas Hukum UPH Medan.* (hlm 5).
- Wayan, R. dkk. (2011). “Kondidi Kawasan Heritage Di Pusat Kota Denpasar”. *Universitas Warmadewa.* (hlm 9).
- Wayan, S, W & Luh, P, T. (2021). “Dinamika Transportasi Umum Di Kota Denpasar Tahun 1992-2018”. *Jurnal Nirwasita, Volume.1 No.2.* (hlm 66-67).
- Wahyudi, Slamet Tri. (2012). “Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2.* (hlm 217-218)

#### **Karya Tulis Ilmiah**

- Andi, Erlangga. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Studi Tinjauan UU No. 35 Tahun 2014 & Hukum Islam).* Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Dawandi, Gumilar. (2016). “Penegakan Hukum Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan *Money Laundering* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. Tesis *Universitas Pasundan.*
- Pratiwi, Putri Elia. 2022. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi Analisis Putusan PN Banyuwangi Nomor 853/Pid.Sus/2019/PN.Byw.* Skripsi Hukum: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Puspitosari, Hervina. 2009. *Kebijakan Kepolisian Resor Sukoharjo Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pembuangan Bayi Oleh Ibu kandungnya*. Tesis Hukum: Universitas. Sebelas Maret Surakarta

Santanu, Adjie. 2020. *Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Penindakan Kejahatan Pembuangan Bayi*. Skripsi Hukum: Universitas Pancasakti Tegal.

#### **Internel/Website**

Kejaksaan Negeri Denpasar. Profil Kejari. Tersedia di (<https://kejari-denpasar.go.id/dasboard>). Diakses Pada (21 Januari 2023).

Pengadilan Negeri Denpasar. Profil Pengadilan Negeri Denpasar. Tersedia di (<https://www.pn-denpasar.go.id>). Diakses Pada (22 Januari 2023).

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95)